

## Media Diminta Jadi Sarana Pendidikan Politik

**SEMARANG-** Media massa, terutama media *mainstream* dinilai dapat menjadi sarana pendidikan politik. Keberadaan media diharapkan bukan sebagai sarana propaganda menyebarkan hal-hal negatif, seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), hoaks, maupun ujaran kebencian.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema "Pemilu 2019 tanpa Isu SARA, Black Campaign dan Hate Speech" yang digelar Radio Elshinta Semarang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, kemarin.

Diskusi menghadirkan empat narasumber yakni Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jateng, Bambang Haryanto, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro dan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menilai, media sosial kerap digunakan kampanye dengan konten-konten negatif. Namun, pihaknya optimistis hal-hal semacam itu bisa ditekan atau diminimalisasi asalkan semua pihak terkait memiliki peran dan tanggung jawab bersama untuk memberikan pendidikan politik yang baik.†

"Kalau saya lihat mulai 2014 sampai sekarang ini saya kira sama, model kampanye lewat medsos, juga media *mainstream*," ungkap Joko.

Sriyanto Saputro juga mengungkapkan hal yang sama. Ia optimistis Jawa Tengah akan tetap kondusif meskipun ada gelaran Pemilu 2019.

### Tidak Mendidik

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah ini†tak memungkiri†masih ada media *mainstream* yang dimiliki politisi atau berafiliasi ke parpol tertentu. Dampaknya,†media tersebut cenderung menampilkan sesuatu yang tidak mendidik.

"Pendidikan politik terus kami lakukan, termasuk di internal. Misalnya tentang media sosial dan Undang-Undang ITE yang bisa berkonsekuensi pidana," imbuhnya.

Bambang Haryanto mengemukakan, sesudah reformasi terjadi lompatan demokrasi yang luar biasa di Indonesia. Begitu pun dengan perkembangan teknologi yang digunakan untuk sarana kampanye.

"Kami yakin dengan komitmen bersama, penyebaran konten negatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi akan sangat bisa diminimalisasi," kata Bambang.

Sementara itu, Teguh Yuwono menyatakan, pelaksanaan pemilu adalah hajat seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, semua pihak harus punya komitmen untuk menjaga pesta demokrasi itu agar tetap kondusif.

Teguh juga meminta kepada parpol agar membuka diri untuk menerima kritik dari publik. Hal itu nantinya akan berdampak positif pada parpol itu sendiri dan masyarakat luas. (ftp-45)